

**PENGARUH DEWAN PENGAWAS SYARIAH, KONEKSI POLITIK,
KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, DAN CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PADA
PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
SEBAGAI SALAH SATU SYARAT MEMPEROLEH GELAR STRATA SATU
DALAM EKONOMI ISLAM**

OLEH:

MUHAMMAD FARID ALI

19108040040

DOSEN PEMBIMBING:

DINIK FITRI RAHAJENG PANGESTUTI, S.E., M.AK

19810802 000000 2 301

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 550821, 512474 Fax. (0274) 586117 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1009/Un.02/DEB/PP.00.9/07/2023

Tugas Akhir dengan judul : PENGARUH DEWAN PENGAWAS SYARIAH, KONEKSI POLITIK, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, DAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD FARID ALI
Nomor Induk Mahasiswa : 19108040040
Telah diujikan pada : Kamis, 20 Juli 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dinik Fitri Rahajeng Pangestuti, SE., M.Ak
SIGNED

Valid ID: 64ba98d37b98



Penguji I

Rosyid Nur Anggara Putra, SPd., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 64b97b204ceb9



Penguji II

Dwi Marlina Wijayanti, S.Pd., M.Sc
SIGNED

Valid ID: 64b9e36e1ba34



Yogyakarta, 20 Juli 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Dr. Afdawaiza, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 64bd901e431d

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Muhammad Farid Ali

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Farid Ali

NIM : 19108040040

Judul skripsi : **“Pengaruh Dewan Pengawas Syariah, Koneksi Politik, Kepemilikan Institusional, Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perbankan Syariah Di Indonesia”.**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam program studi Akuntansi Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Ekonomi Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi sudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 18 Juni 2023

Pembimbing,



all 18/6/23

Dinik Fitri Rahajeng Pangestuti, S.E., M.Ak
NIP 19810802 000000 2 301

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Farid Ali

NIM : 19108040040

Program Studi : Akuntansi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Pengaruh Dewan Pengawas Syariah, Politik, Kepemilikan Institusional, Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perbankan Syariah Di Indonesia”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi atau sanduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *bodynote* dan daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi, dan digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 18 Juni 2023



Muhammad Farid Ali
NIM 19108040040

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai salah satu civitas akademik Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Farid Ali
NIM : 19108040040
Jurusan/Program Studi : Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jenis karya : Skripsi

Dengan pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta hak bebas royalti noneklusif (*nonexclusive royalty free right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Pengaruh Dewan Pengawas Syariah, Koneksi Politik, Kepemilikan Institusional, Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perbankan Syariah Di Indonesia”

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas *royalti noneklusif* ini di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/penyusun dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Yogyakarta

Pada Tanggal: 18 Juni 2023



Muhammad Farid Ali
19108040040

HALAMAN MOTTO

“You are what you think”

“Kamu adalah apa yang kamu pikirkan”

فَارْفَعْ بِضَمٍّ وَأَنْصِبِينَ فُتْحًا وَجُزْءًا كَسْرًا كُنُزُ اللَّهِ عَبْدَهُ يَسُرُّ

(ألفية ابن مالك)

“Bercita-citalah setinggi langit, terbuka dalam berpikir, serta rendahkanlah hatimu. Insya Allah dirimu akan mendapat kemudahan”

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Saya persembahkan skripsi ini kepada keluarga kecil saya yaitu bapak, ibu, dan adik yang selalu memberikan dukungan kepada saya baik moril maupun materil. Keluarga yang selalu menanamkan nilai nilai agama sebagai pokok pokok dalam kehidupan. Keluarga yang selalu menunggu kepulangan anaknya ini dalam segala kondisi. Keluarga yang selalu mendorong saya dalam menggapai cita-cita.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur bagi Allah Swt yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa kesehatan dan akal pikiran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw sebagai *uswatun hasanah* bagi semua makhluk hidup di dunia, serta kepada keluarga, sahabat-sahabatnya, dan umatnya yang selalu berada dibawah naungan ajaran agama Islam.

Adapun penelitian ini berjudul “Pengaruh Dewan Pengawas Syariah, Koneksi Politik, Kepemilikan Institusional, Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perbankan Syariah Di Indonesia”, sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dari awal penyusunan penelitian ini tentu tidak terlepas dari hambatan dan rintangan. Namun, selesainya penelitian ini tentu tidak terlepas atas beberapa pihak yang mendukung, memotivasi dan memberikan doa. Untuk itu penulis mengucapkan beribu terima kasih dan rasa hormat kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil Al Makin., MA selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Afdawaiza, S.Ag., M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajarannya.

3. Bapak Rosyid Nur Anggara Putra, S.Pd., M.Si, selaku Kepala Prodi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Abdul Haris, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah memberikan dukungan.
5. Ibu Dinik Fitri Rahajeng Pangestuti, SE., M.Ak selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan, masukan serta dukungan.
6. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan pengetahuan kepada penulis selama masa perkuliahan.
7. Pengasuh pondok pesantren Al Luqmaniyyah Yogyakarta KH. Naimul Wa'in dan Ibu Nyai Siti Chamnah yang selalu membimbing santrinya dengan sabar dan Ikhlas.
8. Kepada kedua orang tua penulis, Bapak Imam Kamali Ibu Siti Khotimah yang selalu memberikan nasehat-nasehat dan memberikan dukungan kepada anaknya dalam menjalani kehidupan. Kepada adik saya Nur Najwa Fachrun Nisa yang selalu memotivasi penulis untuk bisa memberikan teladan yang baik sebagai seorang kakak.
9. Teman-teman santri Al Luqmaniyyah yang telah memberikan motivasi dengan berbagai caranya baik lewat omongan atau sindiran yang membuat penulis lebih terpacu. Terutama kepada Ahmad Nauval yang telah memberikan banyak masukan dalam penulisan skripsi ini.

10. Teman-teman KKN 108 Desa Dersono yang selalu kompak dan menjaga silaturahmi.
11. Teman-teman seperjuangan akuntansi syariah angkatan 2019 terutama teman-teman kelas A “Aksa Uin Suka”.
12. Seseorang yang selalu memberi dukungan dan motivasi serta sebagai tempat sambat dan keluh kesah penulis yaitu Lia Yulianti.
13. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu per satu.

Terakhir, penulis berharap semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi siapa saja pihak yang membacanya.

Yogyakarta, 18 Juni 2023

Penyusun,



Muhammad Farid Ali
NIM 19108040040

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	v
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
ABSTRAK	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Sistematika Pembahasan.....	9
BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS.....	11
A. Landasan Teori.....	11
1. Teori Agensi.....	11
2. Teori Ketergantungan Sumber Daya (<i>Resource Dependence Theory</i>)	12
3. Penghindaran Pajak (<i>Tax Avoidance</i>)	13
4. Dewan Pengawas Syariah	15
5. Koneksi Politik.....	18
6. Kepemilikan Institusional	19
7. Corporate Social Responsibility (CSR)	20
8. Konsep Pajak Dalam Islam	21
B. Telaah Pustaka	23
1. Penelitian Terdahulu	23
C. Pengembangan Hipotesis	30
1. Pengaruh Ukuran Dewan Pengawas Syariah terhadap Penghindaran Pajak.....	30
2. Pengaruh Lintas Anggota Dewan Pengawas Syariah terhadap Penghindaran Pajak.....	32

3.	Pengaruh Tingkat Pendidikan Dewan Pengawas Syariah terhadap Penghindaran Pajak.....	33
4.	Pengaruh Keahlian Dewan Pengawas Syariah terhadap Penghindaran Pajak ..	35
5.	Pengaruh Reputasi Dewan Pengawas Syariah terhadap Penghindaran Pajak...	36
6.	Pengaruh Remunerasi Dewan Pengawas Syariah terhadap Penghindaran Pajak	38
7.	Pengaruh Pergantian Dewan Pengawas Syariah terhadap Penghindaran Pajak	39
8.	Pengaruh Koneksi Politik Terhadap Penghindaran Pajak.....	40
9.	Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak	41
10.	Pengaruh CSR Terhadap Penghindaran Pajak	42
D.	Kerangka Pemikiran.....	43
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....		44
A.	Jenis Penelitian.....	44
B.	Populasi dan Sampel Penelitian	44
C.	Sumber Data.....	45
D.	Definisi Operasional Variabel dan Pengukurannya	45
1.	Variabel Dependen.....	45
2.	Variabel Independen	46
E.	Teknik Analisis Data.....	50
1.	Analisis Statistika Deskriptif	50
2.	Uji Asumsi Klasik.....	50
3.	Analisis Regresi Linear Berganda.....	52
4.	Uji Hipotesis	53
5.	Uji Koefisien Determinasi	54
BAB IV PEMBAHASAN.....		55
A.	Gambaran Umum Penelitian.....	55
B.	Analisis Data.....	56
1.	Analisis data statistik deskriptif.....	56
2.	Uji Asumsi Klasik.....	60
3.	Analisis Regresi Linear Berganda.....	62
4.	Uji Hipotesis	66
5.	Uji koefisien determinasi (R^2).....	71
C.	Pembahasan.....	71
BAB V PENUTUP.....		81
A.	Kesimpulan	81

B. Keterbatasan penelitian dan saran.....	83
Daftar Pustaka	84
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	89



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	23
Tabel 4.1 Descriptive Statistics	56
Tabel 4.2 Uji multikolinearitas	60
Tabel 4.3 Uji Heteroskedastisitas	61
Tabel 4.4 Uji autokorelasi durbin watson.....	62
Tabel 4.5 Uji Regresi Linear Berganda	63
Tabel 4.6 Uji F.....	66
Tabel 4.7 Uji t.....	67
Tabel 4.8 Uji koefisien determinasi	71



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Sampel penelitian	89
Lampiran 2: Hasil Uji Statistik Deskriptif	90
Lampiran 3: Uji Multikolinearitas	91
Lampiran 4: Uji Heteroskedastisitas.....	92
Lampiran 5: Uji Autokorelasi.....	93
Lampiran 6: Uji Regresi Linear Berganda.....	93
Lampiran 7: Uji F Simultan.....	94
Lampiran 8: Uji t	94
Lampiran 9: Uji Koefisien Determinasi.....	95



ABSTRAK

Pajak adalah sumber pendapatan fiskal pemerintah yang memegang peran penting dalam perekonomian. Pajak merupakan sumber pendapatan negara terbesar di Indonesia dibanding sumber pendapatan yang lainnya. Oleh karena itu, pajak dianggap sesuatu yang vital dalam menunjang pertumbuhan dan pembangunan negara. Akan tetapi pajak dianggap beban bagi perusahaan. Sehingga perusahaan berusaha mengurangi beban pajaknya dengan skema penghindaran pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Dewan Pengawas Syariah, koneksi politik, kepemilikan institusional, dan *corporate social responsibility* terhadap penghindaran pajak. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel DPS dengan indikator tingkat Pendidikan DPS, keahlian DPS, reputasi DPS, serta variabel koneksi politik berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Variabel DPS dengan indikator lintas anggota DPS dan variabel kepemilikan institusional berpengaruh negative terhadap penghindaran pajak. Sementara itu, variabel DPS dengan indikator ukuran DPS, remunerasi DPS, dan pergantian DPS, serta variabel *corporate social responsibility* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Kata kunci: Penghindaran pajak, Dewan pengawas syariah, Koneksi politik, Kepemilikan institusional, *Corporate social responsibility*.



ABSTRACT

Taxes are a source of government fiscal revenue that plays an important role in the economy. Taxes are the largest source of state revenue in Indonesia compared to other sources of income. Therefore, taxes are considered something that is vital in supporting the growth and development of the country. However, taxes are considered a burden for the company. So that companies try to reduce their tax burden with tax avoidance schemes. This study aims to examine the influence of the Sharia Supervisory Board, political connections, institutional ownership, and corporate social responsibility on tax avoidance. The results of this study indicate that the SSB variable with indicators of SSB education level, SSB expertise, SSB reputation, and political connection variables have a positive effect on tax evasion. The SSB variable with SSB cross-member indicators and institutional ownership variables have a negative effect on tax avoidance. Meanwhile, the SSB variable with indicators of SSB size, SSB remuneration, and SSB turnover, as well as corporate social responsibility variables have no effect on tax avoidance.

Keywords: *Tax avoidance, Sharia supervisory board, Political connections, Institutional ownership, Corporate social responsibility.*



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak adalah biaya yang dibebankan pemerintah kepada entitas-entitas bisnis yang menghasilkan pendapatan. Pajak oleh perusahaan dianggap sebagai pengurang laba bersih, sehingga untuk unit usaha seperti perusahaan yang berorientasi pada keuntungan pasti akan selalu mencari solusi untuk mengurangi pembayaran pajak mereka. Menurut Watts (2003), perusahaan akan menggunakan insentif untuk mengakui pendapatan dan dengan sengaja mengidentifikasi biaya untuk mengurangi pendapatan pajak yang ada sampai mereka memiliki keuntungan, penghasilan kena pajak, dan suku bunga positif. Salah satu bentuk upaya mengurangi pembayaran pajak ini adalah dengan melakukan penghindaran pajak. Penghindaran pajak (tax avoidance) adalah upaya yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk menghindari pembayaran pajak secara sah dan aman tanpa melanggar peraturan perundang-undangan karena cara dan teknik yang digunakan memanfaatkan kelemahan peraturan perundang-undangan perpajakan (Napitupulu et al., 2019).

Kasus penghindaran pajak ini marak dilakukan oleh perusahaan, baik perusahaan yang ada di Indonesia atau perusahaan global dunia. Contoh kasus adalah praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh PT Adaro Energy Tbk. PT Adaro Energy Tbk melakukan penghindaran pajak dengan skema *transfer pricing* melalui anak perusahaannya yang ada di Singapura, Coaltrade services International Pte Ltd. Perusahaan ini melakukan praktik *transfer pricing* yaitu

dengan cara memindahkan jumlah labanya yang besar dari perusahaannya yang di Indonesia ke perusahaan di negara yang tarif pajaknya rendah. Hal ini dilakukan untuk menghindari kewajiban pajak dalam negeri sehingga memberi penghasilan yang lebih tinggi bagi pemegang saham perusahaan. Praktik *transfer pricing* ini terindikasi pada laporan keuangan yang mengandung transaksi tidak wajar yang dilakukan antara PT Adaro Energy Tbk dengan Coaltrade services International Pte Ltd. Transaksi ini menunjukkan adanya ketimpangan harga transfer bila dibandingkan dengan harga pasar batubara secara global (Narsa, 2022).

Selain dilakukan oleh perusahaan yang ada di Indonesia, kasus penghindaran pajak juga kerap kali dilakukan oleh perusahaan dengan skala internasional. Salah satu contohnya yaitu perusahaan teknologi asal Amerika Serikat (AS) Google. Google melakukan penghindaran pajak sebesar 19,9 miliar euro (US\$ 22,7 miliar atau sekitar Rp 327 triliun) melalui perusahaan cabang di Belanda pada 2017 (Sebayang, 2019). Google memindahkan keuntungan ke Irlandia dan Luksemburg, keduanya memiliki tarif pajak yang rendah. Praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh Google ini populer dengan istilah *Double Irish with A Dutch Sandwich*, umumnya praktik ini mencakup dua perusahaan Irlandia dan satu perusahaan di Belanda.

Lembaga keuangan seperti bank juga tidak luput dari praktik penghindaran pajak. Transparency International Uni Eropa menyampaikan laporan praktik pemindahan laba untuk cakupan yang besar oleh perbankan Eropa di yurisdiksi surga pajak yang ditaksir mencapai €4,5 miliar atau setara dengan Rp76,8 triliun

(Setiawan, 2020). Tercatat bahwa 29 dari 39 bank besar Eropa telah mentransfer keuntungan operasional ke negara-negara tanpa karyawan atau tanpa aktivitas fisik.

Pada penelitian ini, peneliti akan membahas lebih jauh tentang penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang terjadi pada perbankan syariah yang ada di Indonesia. Perbankan syariah harusnya dapat menghindari kegiatan yang tidak etis seperti penghindaran pajak. Penghindaran pajak dianggap sebagai perilaku yang tidak etis dan tidak sesuai dengan batas peraturan karena perusahaan menyusun skema perencanaan pajak yang agresif untuk mengurangi beban pajak mereka, sehingga berdampak negatif pada pendanaan layanan publik (Abid, 2021). Perilaku penghindaran pajak dianggap sebagai perilaku yang tidak bertanggung jawab secara sosial dan tindakan berbahaya bagi tata kelola perusahaan, karyawan, masyarakat, lingkungan, dan lain lain. Adanya perbankan syariah diharapkan dapat menciptakan keadilan dan meningkatkan kualitas hidup umat sesuai syariat islam. Perbankan syariah harus menerapkan sistem keuangan yang sesuai syariat islam dan tidak boleh ada unsur riba di dalamnya.

Namun, pada kenyataannya perbankan syariah masih banyak yang menerapkan sistem yang sama seperti halnya bank konvensional. Bank syariah dianggap hanya menutup pintu depan riba, tetapi secara bersamaan membuka pintu belakang dari riba. konsep *profit and loss sharing* hanya sebagai konsep saja, tetapi dari segi pengaplikasiannya tidak jauh berbeda dari bank konvensional (Chong & Liu, 2009). Perbankan syariah memiliki sistem tata

kelola yang berbeda dari perbankan konvensional dengan adanya suatu Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS mempunyai peran yang sangat vital pada bank syariah terutama pada aspek kepatuhan syariah (*shariah compliance*). DPS bertanggung jawab untuk mengeluarkan fatwa yang harus dipatuhi oleh bank syariah, mengawasi semua transaksi bank, memeriksa semua produk bank, mengawasi semua cabang dan departemen, serta memberikan opini tentang bagaimana kepatuhan syariah itu dicapai (Abbas *et al.*, 2009; (M. Iqbal *et al.*, 1998). Dengan demikian, tujuan DPS adalah untuk memantau dan mengontrol penerapan kepatuhan syariah yang dilakukan oleh bank syariah (Buallay, 2019).

Aspek kepatuhan syariah yang harus dicapai oleh perbankan salah satunya adalah terkait laporan keuangan. Laporan keuangan tidak boleh mengandung unsur ketidakadilan dan suatu hal yang dilarang seperti riba dan maysir. Selain itu, bank syariah juga berkaitan erat dengan kegiatan yang tidak etis (Ozili & Outa, 2017), seperti perataan laba dan penghindaran pajak. Penghindaran pajak dianggap sebagai perilaku yang tidak etis karena menyebabkan penurunan pemasukan kas negara yang selanjutnya berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang terhambat (Taufik, 2021). Penelitian ini akan menjelaskan bagaimana karakteristik DPS seperti ukuran DPS, *cross-membership* DPS, tingkat pendidikan DPS, keahlian DPS, reputasi DPS, remunerasi DPS, dan pergantian DPS mempengaruhi penghindaran pajak. Berdasarkan penelitian Muhammad Taufik (2021) karakteristik yang berupa keahlian, reputasi, dan *turnover* DPS efektif dalam mengurangi penghindaran pajak. Sebaliknya, ukuran DPS, lintas keanggotaan DPS, dan remunerasi DPS mengarah kepada penghindaran pajak.

Selain faktor DPS, faktor lain yang diteliti adalah tentang pengaruh koneksi politik terhadap penghindaran pajak perbankan syariah. Koneksi politik merupakan sarana yang digunakan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan. Koneksi politik memiliki peran untuk mengakomodasi urusan-urusan perusahaan salah satunya terkait perpajakan. Adanya kedekatan hubungan politik antara perusahaan dengan aparat pemerintah atau partai politik membuat peluang penghindaran pajak semakin besar. Hal ini disebabkan pihak perusahaan lebih gampang mendapatkan informasi terkait aturan perpajakan, sehingga perusahaan dapat menyusun strategi untuk mengakali cara memperkecil pengeluaran untuk membayar pajak baik itu dengan skema penghindaran pajak ataupun tidak. Penelitian sebelumnya banyak yang mendukung argumen tentang semakin tingginya hubungan politik suatu perusahaan, semakin tinggi pula tingkat penghindaran pajaknya. Hal ini sesuai dengan penelitian Hana Ajili dan Hichem Khelifi (2020) dan Kim & Zhang (2016).

Variabel selanjutnya yaitu kepemilikan institusional. Secara teoritis, kepemilikan institusional memiliki dua dampak pada perilaku penghindaran pajak yaitu mendukung atau menekan. Sebaliknya, pemegang saham institusional dengan persentase kepemilikan yang tinggi lebih mampu dan termotivasi daripada pemegang saham minoritas untuk mengintervensi perilaku penghindaran pajak perusahaan dan meningkatkan keuntungan (Jiang et al., 2021). Penelitian dari Anissa Dakhli (2021) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Sementara itu

penelitian Jiang et al., (2021) menunjukkan hal sebaliknya, yaitu kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak perusahaan.

Variabel terakhir dalam penelitian ini adalah *corporate social responsibility* (CSR). Perusahaan menggunakan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) untuk membangun legitimasi sosial yang positif (Amalia & Suprapti, 2020). Legitimasi atau citra positif di masyarakat ini menunjang keberlanjutan perusahaan kedepannya. Legitimasi ini berkaitan erat dengan praktik bisnis etis. Penghindaran pajak yang dinilai sebagai kegiatan legal dalam rangka maksimalisasi kekayaan pemegang saham dianggap sebagai praktik bisnis yang tidak etis. Tidak etis karena penghindaran pajak dapat mengurangi jumlah pendapatan yang seharusnya diterima negara sehingga hal-hal yang seharusnya dapat dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak dapat dilakukan secara optimal (Amalia & Suprapti, 2020). Penelitian sebelumnya menunjukkan hasil beragam yang menunjukkan hubungan CSR dengan penghindaran pajak. Penelitian Liu & Lee (2019) menyatakan bahwa CSR tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sementara itu penelitian Fallan & Fallan (2019) menyatakan bahwa CSR yang bersifat wajib berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Selanjutnya, penelitian ini memberikan beberapa kontribusi. Pertama, literatur yang membahas hubungan antara dewan pengawas syariah dan penghindaran pajak perbankan syariah masih sangat terbatas. Hal ini dibuktikan oleh peneliti dengan mencari artikel atau jurnal di empat Lembaga *publishing* jurnal internasional yaitu Cambridge, Wiley, Taylor & Francis, dan Emerald.

Hasilnya, peneliti hanya menemukan jurnal hasil penelitian Taufik (2021) yang secara spesifik membahas hubungan DPS dengan penghindaran pajak. Kebanyakan artikel lain membahas hubungan DPS dengan kinerja bank, kepatuhan syariah, atau pengambilan risiko.

Kedua, penelitian terdahulu jarang yang berkonsentrasi pada pengaruh koneksi politik terhadap penghindaran pajak perbankan syariah. Penelitian terdahulu kebanyakan menggunakan objek perusahaan manufaktur atau perusahaan yang telah *listing* di bursa efek seperti penelitian Firmansyah et al., (2022) dan penelitian Iswari et al., (2019). Oleh karena itu, menjadi menarik untuk menguji apakah koneksi politik memiliki pengaruh yang sama di sektor ini. Selain itu, hasil yang beragam dari hubungan antara variabel independen dan dependen pada penelitian sebelumnya juga membuat peneliti tertarik untuk menelusuri lebih lanjut terkait hubungan variabel independen dan dependen. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya maka peneliti memilih judul: “Pengaruh Dewan Pengawas Syariah, Koneksi Politik, Kepemilikan Institusional, dan Corporate Social Responsibility Terhadap Penghindaran Pajak Perbankan Syariah di Indonesia”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh dewan pengawas syariah terhadap penghindaran pajak perbankan syariah di Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh koneksi politik terhadap penghindaran pajak perbankan syariah di Indonesia?

3. Bagaimana pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak perbankan syariah di Indonesia?
4. Bagaimana pengaruh *corporate social responsibility* terhadap penghindaran pajak perbankan syariah di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi rumusan masalah yang telah disusun, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk

1. Mengidentifikasi pengaruh dewan pengawas syariah terhadap penghindaran pajak perbankan syariah di Indonesia.
2. Mengidentifikasi pengaruh koneksi politik terhadap penghindaran pajak perbankan syariah di Indonesia.
3. Mengidentifikasi pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak perbankan syariah di Indonesia.
4. Mengidentifikasi pengaruh *corporate social responsibility* terhadap penghindaran pajak perbankan syariah di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

- a. Mengetahui bagaimana karakteristik dewan pengawas syariah, koneksi politik, kepemilikan institusional, dan *corporate social responsibility*

(CSR) mempengaruhi penghindaran pajak perbankan syariah di Indonesia.

- b. Sebagai bentuk pengaplikasian dalam kehidupan dari materi perkuliahan yang sudah dipelajari.
- c. Sebagai referensi bagi para peneliti selanjutnya dan kontribusi ilmiah pada bidang akuntansi dan perpajakan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pihak perbankan syariah, diharapkan penelitian ini menjadi bahan pertimbangan oleh manajemen bank syariah agar tidak melakukan penghindaran pajak karena dampaknya yang buruk terhadap nilai perusahaan itu sendiri atau bagi masyarakat dan pemerintah.
- b. Bagi pemerintah, membantu regulator meninjau dan mengevaluasi undang undang perpajakan dan tarif pajak untuk menghindari kerugian negara.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan terbagi menjadi lima bab yang penjelasannya sebagai berikut:

Bab 1 Pendahuluan, berisi tentang uraian masalah dan fenomena yang dipaparkan pada bagian latar belakang, tujuan, dan manfaat penelitian, dan bab ini diakhiri dengan sistematika pembahasan. Masalah yang diteliti terdapat pada bagian latar belakang. Pertanyaan penelitian masuk pada bagian rumusan masalah. Tujuan dan manfaat dijelaskan pada sub-bab

tujuan dan manfaat. Sistematika pembahasan berisi penjelasan singkat untuk setiap bab.

Bab II Landasan Teori, berisi tentang teori dan informasi variabel yang digunakan pada penelitian. Selain itu, bab ini juga membahas penelitian-penelitian sebelumnya dengan hasil yang beragam. Selanjutnya, dalam bab ini dijelaskan pula pengertian dari masing masing variabel, baik variabel independen maupun dependen seperti penghindaran pajak, dewan pengawas syariah, koneksi politik, kepemilikan institusional, dan *corporate social responsibility*.

Bab III Metodologi Penelitian, menjelaskan tentang jenis penelitian, populasi dan sampel penelitian, sumber data, definisi operasional variabel, dan teknik analisis data.

Bab IV Pembahasan, bab ini mencakup tentang gambaran umum penelitian, analisis data, serta pembahasan. Secara singkat bab ini menjelaskan tentang pengolahan data dan interpretasi data yang sudah diolah.

Bab V Penutup, berisi tentang kesimpulan berdasarkan pembahasan di bab IV, keterbatasan penelitian serta saran untuk penelitian selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini mengidentifikasi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak di lingkungan perbankan syariah. Faktor yang diidentifikasi dalam penelitian ini adalah pengaruh variabel independent yang terdiri dari Dewan pengawas syariah (DPS), koneksi politik, kepemilikan institusional, dan *corporate social responsibility* (CSR) dengan menggunakan perbankan syariah di Indonesia yang terdaftar OJK dengan periode pengamatan selama 5 tahun yaitu 2016-2021 sebagai sampel penelitian. Berdasarkan analisis data, hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa terdapat lima hipotesis yang diterima dan lima hipotesis yang ditolak. Lintas anggota DPS dan kepemilikan institusional terbukti dapat mengurangi tingkat penghindaran pajak. Lintas anggota DPS dinilai cenderung meningkatkan pengawasan karena rangkap jabatan DPS akan meningkatkan kompetensi dan pengalamannya. Anggota DPS dapat mengaplikasikan pengalaman yang didapat dari entitas lain untuk meningkatkan kualitas pengawasannya. Kepemilikan institusional dianggap sebagai mekanisme kunci tata kelola perusahaan yang efektif dalam memantau keputusan manajemen terkait dengan penghindaran pajak. Sehingga kepemilikan institusional mampu menekan perilaku penghindaran pajak perbankan syariah.

Sebaliknya, tingkat pendidikan DPS, keahlian DPS, reputasi DPS, dan koneksi politik malah mengarah pada penghindaran pajak. Tingkat pendidikan syariah tidak cukup untuk mengurangi praktik penghindaran pajak. Selain itu, keahlian DPS di bidang keuangan disalah gunakan untuk mendukung skema penghindaran pajak dengan metode-metode yang hanya dipahami oleh ahli keuangan saja. Reputasi DPS dengan menjabat di lembaga MUI juga belum bisa menjadi jaminan keindependensian DPS dalam menjalankan tugas pengawasannya terhadap bank syariah. Koneksi politik memberikan akses perlindungan secara politik sehingga membuat perbankan syariah berani mengambil risiko untuk melakukan penghindaran pajak.

Selanjutnya yaitu ukuran DPS, remunerasi DPS, pergantian DPS, dan CSR terbukti tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. DPS yang hanya berfokus pada transaksi konstitusional dan tingkat pengawasan DPS yang masih terbatas membuat sedikit banyaknya anggota DPS tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Kedudukan DPS sebagai lembaga independen yang melakukan pengawasan dan memberikan opini syariah terhadap perbankan syariah juga tidak bisa dipengaruhi oleh remunerasi yang didapat oleh DPS. Sistem rekrutmen pada pergantian DPS juga belum efektif sehingga dengan adanya pergantian belum bisa mengurangi adanya penghindaran pajak. CSR yang hanya digunakan sebagai legitimasi hukum tanpa pengaplikasian pada aspek-aspek bisnisnya membuat CSR tidak mampu mengurangi perilaku oportunistik yang terjadi seperti penghindaran pajak.

B. Keterbatasan penelitian dan saran

Pengukuran penghindaran pajak masih terbatas pada satu proksi yaitu ETR saja, padahal banyak proksi yang bisa digunakan dalam mengukur penghindaran pajak. Sehingga disarankan pada peneliti berikutnya untuk menggunakan proksi yang lain seperti CETR, BTD, atau yang lainnya untuk mengukur penghindaran pajak. Untuk selanjutnya dibandingkan dengan proksi ETR. Pengukuran tingkat pendidikan DPS hanya mengukur anggota DPS dengan gelar doktor dibidang fiqih muamalat saja, sehingga diharapkan peneliti selanjutnya dapat mengukur tingkat pendidikan DPS mulai dari jenjang strata 1 atau magister untuk melihat perbandingannya dengan jenjang doktoral. Selain itu, Pengukuran CSR dengan indeks GRI G4 dianggap kurang maksimal karena masih sedikitnya perbankan syariah yang menggunakan format indeks GRI G4 dalam mengungkapkan CSR nya. Sehingga peneliti berikutnya dapat menggunakan proksi lain dalam mengungkapkan CSR nya.

Daftar Pustaka

- Abbas, S.Z.M., Rahman, R.A. and Mahenthrian, S. (2009), "Ultimate ownership and performance of Islamic financial institutions in Malaysia", SSRN Electronic Journal, available at [:https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1392833](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1392833)
- Abid, S. (2021). *Corporate social responsibility and tax avoidance : the case of French companies*. <https://doi.org/10.1108/JFRA-04-2020-0119>
- Ahlemann, F., Bode, C., Brühl, R., Büschken, J., Dobusch, L., Elsas, R., Florysiak, D., Friedl, G., Güttel, W., Hofmann, C., Hutter, K., Johannig, L., Kaiser, S., Kieser, A., Kliewer, N., Zu Knyphausen-Aufseß, D., Köszegi, S. T., Kozica, A., Kretschmer, T., ... Zwick, T. (2017). Junior Management Science. *Junior Management Science*, 3, 43–60. <https://doi.org/10.5282/jums/v2i2pp43-60>
- Ajili, H., & Khelif, H. (2020). Political connections, joint audit and tax avoidance: evidence from Islamic banking industry. *Journal of Financial Crime*, 27(1), 155–171. <https://doi.org/10.1108/JFC-01-2019-0015>
- Amalia, F. A., & Suprapti, E. (2020). *Does the High or Low of Corporate Social Responsibility Disclosure affect Tax Avoidance?* 21(2). <https://doi.org/10.18196/jai.2102149>
- Arinta, Y. N. (2018). *BISNIS, Vol. 6 No. 2, Des 2018* 69. 6(2), 69–86.
- Baklouti, I. (2020). *Is the Sharia supervisory board a friend or an enemy of Islamic banks ?* <https://doi.org/10.1108/JIMA-04-2020-0118>
- Bendickson, J., Muldoon, J., Liguori, E., & Davis, P. E. (2016). Agency theory: the times, they are a-changin'. *Management Decision*, 54(1), 174–193. <https://doi.org/10.1108/MD-02-2015-0058>
- Biermann, R., & Harsch, M. (2017). Palgrave Handbook of Inter-Organizational Relations in World Politics. *Palgrave Handbook of Inter-Organizational Relations in World Politics*, 135–155. <https://doi.org/10.1057/978-1-137-36039-7>
- Brin, P., & Nehme, M. N. (2019). Corporate Social Responsibility: Analysis of Theories and Models. *EUREKA: Social and Humanities*, 5(March 2020), 22–30. <https://doi.org/10.21303/2504-5571.2019.001007>
- Buallay, A. (2019). Corporate governance, Sharia'ah governance and performance: A cross-country comparison in MENA region. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 12(2), 216–235. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-07-2017-0172>

- Chong, B. S., & Liu, M. H. (2009). Islamic banking: Interest-free or interest-based? *Pacific Basin Finance Journal*, 17(1), 125–144. <https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2007.12.003>
- Dakhli, A. (2021). *The impact of ownership structure on corporate tax avoidance with corporate social responsibility as mediating variable*. <https://doi.org/10.1108/JFC-07-2021-0152>
- Deslandes, M., Fortin, A., & Landry, S. (2020). Audit committee characteristics and tax aggressiveness. *Managerial Auditing Journal*, 35(2), 272–293. <https://doi.org/10.1108/MAJ-12-2018-2109>
- Fallan, E., & Fallan, L. (2019). Corporate tax behaviour and environmental disclosure: Strategic trade-offs across elements of CSR? *Scandinavian Journal of Management*, 35(3), 101042. <https://doi.org/10.1016/j.scaman.2019.02.001>
- Farag, H., Mallin, C., & Ow-Yong, K. (2018). Corporate governance in Islamic banks: New insights for dual board structure and agency relationships. *Journal of International Financial Markets, Institutions and Money*, 54, 59–77. <https://doi.org/10.1016/j.intfin.2017.08.002>
- Farook, S., & Lanis, R. (2005). Banking on Islam? Determinants of corporate social responsibility disclosure. *Islamic Economics and Finance*, 2(17), 355–388.
- Fatikhatun Riziqiyah, M., Ekonomi dan Bisnis, F., & Jenderal Soedirman, U. (n.d.). *Pengaruh Islamic Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Bambang Agus Pramuka* (Vol. 21).
- Firmansyah, A., Arham, A., Qadri, R. A., Wibowo, P., Irawan, F., Kustiani, N. A., Wijaya, S., Andriani, A. F., Arfiansyah, Z., Kurniawati, L., Maburur, A., Dinarjito, A., Kusumawati, R., & Mahrus, M. L. (2022). Political connections, investment opportunity sets, tax avoidance: does corporate social responsibility disclosure in Indonesia have a role? *Heliyon*, 8(8). <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e10155>
- Ghozali, I. (2012). *Aplikasi analisis Multivariat dengan program IBM SPSS 20*. Edisi 6. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Gunawan, J. (2020). Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional, dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI pada Periode 2015-2018. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 5(2), 364–382.
- Hanlon, M., & Heitzman, S. (2010). A review of tax research. *Journal of Accounting and Economics*, 50(2–3), 127–178. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2010.09.002>

- Hsu, P. H., Moore, J. A., & Neubaum, D. O. (2018). Tax avoidance, financial experts on the audit committee, and business strategy. *Journal of Business Finance and Accounting*, 45(9–10), 1293–1321. <https://doi.org/10.1111/jbfa.12352>
- Iqbal, M., Ahmad, A., & Khan, T. (1998). *Challenges Facing Challenges Facing* (Issue 1).
- Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2008). No Title. In *Pengantar Keuangan Islam : Teori Dan Praktik*. Prenada Media Group.
- Iswari, P., Sudaryono, E. A., & Widarjo, W. (2019). Political connection and tax aggressiveness: A study on the state-owned enterprises registered in Indonesia stock exchange. *Journal of International Studies*, 12(1), 79–92. <https://doi.org/10.14254/2071-8330.2019/12-1/5>
- Jiang, Y., Zheng, H., & Wang, R. (2021). The effect of institutional ownership on listed companies' tax avoidance strategies. *Applied Economics*, 53(8), 880–896. <https://doi.org/10.1080/00036846.2020.1817308>
- Khan, I., Zahid, S. N., & Akhtar, T. (2018). Shari'ah Governance and Islamic Banks Performance: Evidence from South Asia. *South Asian Journal of Management Sciences*, 12(2), 173–187. <https://doi.org/10.21621/sajms.2018122.04>
- Liu, H., & Lee, H. (2019). *The effect of corporate social responsibility on earnings management and tax avoidance in Chinese listed companies*. <https://doi.org/10.1108/IJAIM-08-2018-0095>
- Muhammad, R., Azlan Annuar, H., Taufik, M., & Nugraheni, P. (2021). The influence of the SSB's characteristics toward Sharia compliance of Islamic banks. *Cogent Business and Management*, 8(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2021.1929033>
- Mukhibad, H., Jayanto, P. Y., Jati, K. W., & Khafid, M. (2022). Attributes of Shariah Supervisory Board and Shariah Compliance. *Corporate Governance and Organizational Behavior Review*, 6(3), 173–180. <https://doi.org/10.22495/cgobrv6i3p16>
- Mukhibad, H., & Setiawan, D. (2022). Shariah supervisory board attributes and corporate risk-taking in Islamic banks. *Cogent Business and Management*, 9(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2022.2158607>
- Napitupulu, I. Iham H., Situngkir, A., & Edelia, A. (2019). Triggers Of Tax Avoidance Practices In Indonesia. *International Journal of Economics, Business and Management Research*, 3(11), 185–191.
- Narsa, N. P. D. R. H. (2022). *Kecenderungan Perusahaan Melakukan Penghindaran Pajak: Berpengaruhkah Terhadap Keterbacaan Laporan Keuangan yang Rendah?* <https://News.Unair.Ac.Id/>. <https://news.unair.ac.id/2022/01/28/kecenderungan->

perusahaan-melakukan-penghindaran-pajak-berpengaruhkan-terhadap-keterbacaan-laporan-keuangan-yang-rendah-2/?lang=id

- Nomran, N. M., Haron, R., & Hassan, R. (2020). Shari'Ah Supervisory Board Characteristics Effects on Islamic Banks' Performance: Evidence from Malaysia. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3598723>
- Nugraheni, P. (2018). Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia Sharia supervisory board and social performance of Indonesian Islamic banks. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia*, 22(December).
- Ozili, P. K., & Outa, E. (2017). Bank loan loss provisions research: A review. *Borsa Istanbul Review*, 17(3), 144–163. <https://doi.org/10.1016/j.bir.2017.05.001>
- Quttainah, M. A., & Almutairi, A. R. (2017). Corporate ethics: evidence from Islamic banks. *Journal of Management and Governance*, 21(4), 815–840. <https://doi.org/10.1007/s10997-016-9360-6>
- Quttainah, M. A., Song, L., & Wu, Q. (2013). Do islamic banks employ less earnings management? *Journal of International Financial Management and Accounting*, 24(3), 203–233. <https://doi.org/10.1111/jifm.12011>
- Rahmawati, D. R. M. (2022). *Pengaruh Islamic Corporate Governance dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance*.
- Ridwan, R., & Mayapada, A. G. (2022). Does sharia governance influence corporate social responsibility disclosure in Indonesia Islamic banks? *Journal of Sustainable Finance and Investment*, 12(2), 299–318. <https://doi.org/10.1080/20430795.2020.1749819>
- Sebayang, R. I. B. (2019). *Dokumen: Google Lakukan Penghindaran Pajak Rp 327 Triliun*. www.Cnbcindonesia.Com. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190104214635-4-49236/dokumen-google-lakukan-penghindaran-pajak-rp-327-triliun>
- Sekaran, U. (2011). *Research Methods For Business* (Edisi 4). Salemba Empat.
- Setiawan, D. A. (2020). *Hindari Pajak, 29 dari 39 Bank Besar Alihkan Laba ke Luar Negeri*. News.Ddtc.Co.Id. <https://news.ddtc.co.id/hindari-pajak-29-dari-39-bank-besar-alihkan-laba-ke-luar-negeri-25186>
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta.
- Taufik, M. (2021). Can Shari'ah supervisory board and Islamic bank characteristics reduce tax avoidance? Evidence in Indonesia and Malaysia. *Journal of Financial Crime*. <https://doi.org/10.1108/JFC-03-2022-0059>

- Taufik, M. (2022). Can Shari'ah supervisory board and Islamic bank characteristics reduce tax avoidance? Evidence in Indonesia and Malaysia. *Journal of Financial Crime*. <https://doi.org/10.1108/JFC-03-2022-0059>
- Wang, F., Xu, S., Sun, J., & Cullinan, C. P. (2020). Corporate Tax Avoidance: a Literature Review and Research Agenda. *Journal of Economic Surveys*, 34(4), 793–811. <https://doi.org/10.1111/joes.12347>
- Watts, R. L. (2003). Modern Electrochemistry: An introduction to an interdisciplinary area. *Accounting Horizons: September 2003*, 17(3), 207–221.

